



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH LAMPUNG
JL. R.W. MONGINSIDI NO. 184 BANDAR LAMPUNG
(0721) 485427 – 483927 - 474813
Website: lampung.kemenkumham.go.id
Email:kanwillampung@kemenkumham.go.id

Nomor : W.9-PR.04.05 – 541 06 Maret 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 6 (enam) berkas
Hal : Capaian Indikator Kinerja Berdasar pada
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Lampung

Yth. Sekretaris Jenderal
u.p Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
Kementerian Hukum RI

di –
Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Nomor : SEK.1-PR.04.05-116 tanggal 24 Februari 2025 hal Capaian Indikator Kinerja Berdasar pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Berdasar pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Santosa

MATRIKS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TA 2025 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG - SEKRETARIAT JENDERAL

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (PERJANJIAN KINERJA)	TARGET	RINCIAN OUTPUT	TARGET	KOMPONEN	SUB KOMPONEN		WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN (PER BULAN)	DETIL KEGIATAN
						NAMA KEGIATAN	ANGGARAN		
1.	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	Layanan Reformasi Kinerja	3 Laporan	051. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemenuhan Data Dukung RKT RB General dan RB Tematik 2025	Rp. 6,255,000,- (blokir)	Maret, Juni, September, dan Desember	1. Perencanaan : Mensosialisasikan daduk RKT. 2. Pelaksanaan : Mengumpulkan dan mengupload daduk RKT RB.
						Evaluasi Pemenuhan Data Dukung RKT RB General TW I, II, III, IV dan RB Tematik B12 Tahun 2025		April, Juli, Oktober, Desember	1. Perencanaan : Hasil Verifikasi Daduk oleh Tim Itjen. 2. Pelaksanaan : Mengevaluasi secara mandiri daduk hasil Verifikasi.
					052. Pembentukan Satker WBK/WBBM	Pelaksanaan Kegiatan Komitmen Zona Integritas Tahun 2025	Rp. 33,570,000,- (blokir)	Januari	1. Perencanaan : Rapat Persiapan dan Menyiapkan Berkas Administrasi Kegiatan. 2. Pelaksanaan : Kegiatan Penandatanganan Komitmen Zona Integritas Tahun 2025.
						Pemenuhan Data Dukung LKE ZI Periode B03, B06, B09, dan B12 Tahun 2025		Maret, Juni, September, dan Desember	1. Perencanaan : Mensosialisasi Daduk LKE ZI. 2. Pelaksanaan : Kegiatan Menyiapkan dan Mengupload Data Dukung LKE ZI WBK.
						Desk Evaluasi TPI dan TPN Pembangunan ZI		April, Mei, September, dan Oktober	1. Perencanaan : Rapat Persiapan dan Menyiapkan dokumen LKE WBK. 2. Pelaksanaan : Kegiatan Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas oleh Tim Inspektorat Jenderal.
052. Pembangunan Budaya Anti Korupsi dan Unit Pemberantasan Pungli dan Gratifikasi	Sosialisai atau Birtek Pengendalian Gratifikasi dan Pencegahan Korupsi	RP. 10,855,000,- (blokir)	September	1. Perencanaan : Rapat Persiapan, dan Menyiapkan Berkas Administrasi. 2. Pelaksanaan : Kegiatan Sosialisai Pengendalian Gratifikasi dan Pencegahan Korupsi kepada Pegawai.					

MATRIKS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TA 2025 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG - PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (PERJANJIAN KINERJA)	TARGET	RINCIAN OUTPUT	TARGET	KOMPONEN	SUB KOMPONEN		WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN (PER BULAN)	DETIL KEGIATAN
						NAMA KEGIATAN	ANGGARAN		
1.	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang di fasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	Rekomendasi Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	22 rekomendasi Kebijakan	051 Persiapan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah	Belanja bahan Persiapan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah	Rp. 1.579.000,- (blokir)	April, Juni	1. Perencanaan : Pengumpulan Bahan Persiapan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah. 2. Pelaksanaan : Melaksanakan Persiapan Rapat Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah.
							Rp. 860.000,- (tidak blokir)		
					052 Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah	Koordinasi dengan Instansi Terkait di Daerah	Rp. 23.775.000,- (blokir)	-	Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait tidak bisa dilaksanakan karena Anggaran di Blokir sepenuhnya.
						Pelaksanaan Harmonisasi		Rp. 56.230.000,- (blokir)	Maret s/d November
							Rp. 149.790.000,- (tidak blokir)		
					053 Pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah	Pemetaan Peraturan Daerah/Rancangan Produk Hukum Daerah	Rp. 580.000,- (blokir)	April	1. Perencanaan : Menyiapkan bahan kegiatan Pemetaan Peraturan Daerah/Rancangan Produk Hukum Daerah dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. 2. Pelaksanaan : Melaksanakan Kegiatan Pemetaan Peraturan Daerah/Rancangan Produk Hukum Daerah.
Rp. 2.320.000,- (tidak blokir)									
	Perencanaan Kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang undangan di daerah	Rp. 8.995.000,- (blokir)	-	Perencanaan Kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang - undangan di daerah tidak bisa dilaksanakan karena Anggaran di Blokir sepenuhnya.					

2.	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang - Undangan	20 Orang	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah	20 Orang	051 Persiapan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang undangan	Belanja bahan Persiapan Kegiatan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Rp. 796.000,- (blokir)	April	1. Perencanaan : Pengumpulan Bahan Persiapan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan. 2. Pelaksanaan : Melaksanakan Persiapan Kegiatan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
							Rp. 200.000,- (tidak blokir)		
					052 Pelaksanaan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Rapat Pengarahan dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Rp. 2.170.000,- (blokir)	April	Rapat Pengarahan tidak bisa dilaksanakan karena Anggaran di Blokir, tetapi langsung melaksanakan Rapat Pendalaman materi Pembinaan Perancang yang anggaran diblokir sebagian. 1. Perencanaan : Menyiapkan SK Peserta dan SK Narasumber dengan mengundang Peserta dari Perancang Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan JFT Perancang dari Pemerintah Daerah. 2. Pelaksanaan : Melaksanakan Kegiatan Pendalaman Materi Pembinaan Perancang Peraturan Daerah dan Perancangan Peraturan daerah.
						Pendalaman Materi Pembinaan Perancang Peraturan Daerah dan Perancangan Peraturan daerah	Rp. 4.820.000,- (blokir)		
					053 Pelaporan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang undangan	Pelaporan bahan kegiatan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang undangan	Rp. 12.612.000,- (blokir)	April, Mei, Juni	Kegiatan Bimbingan Teknis Perancangan Peraturan Daerah tidak bisa dilaksanakan karena Anggaran di Blokir sepenuhnya. 1. Perencanaan : Membuat Persiapan Kegiatan Indeks Reformasi Hukum dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang akan melaksanakan Penilaian Indeks Reformasi Hukum. 2. Pelaksanaan : Melaksanakan Penilaian Indeks Reformasi Hukum ke Pemerintah Daerah yang menjadi tujuan Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
							Rp. 5.990.000,- (blokir)		
					053 Pelaporan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang undangan	Pelaporan bahan kegiatan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang undangan	Rp. 150.000,- (blokir)	Juli	1. Perencanaan : Menyiapkan bahan-bahan pelaporan Kegiatan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang undangan. 2. Pelaksanaan : Melaksanakan Pelaporan Kegiatan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang undangan.
							Rp. 50.000,- (tidak blokir)		

MATRIKS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TA 2025 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG - BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (PERJANJIAN KINERJA)	TARGET	RINCIAN OUTPUT	TARGET	KOMPONEN	SUB KOMPONEN		WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN (PER BULAN)	DETIL KEGIATAN
						NAMA KEGIATAN	ANGGARAN		
1.	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah	1.0 Rekomendasi Kebijakan	052. Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum	Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum	Rp. 3.235.000,-	Januari - Maret	1. Perencanaan : - Penentuan Tema; - Penelusuran dan Inventarisasi; - Penyusunan Term of Reference; - Pembentukan Tim Pokja. 2. Pelaksanaan : - Rapat Internal Analisis dan Evaluasi.
					053. Perumusan Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	Perumusan Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	Rp. 3.010.000,-	Oktober - Desember	1. Perencanaan : - Anev perda dengan evadata.kemenkum.go.id. 2. Pelaksanaan : - Rapat Internal Analisis dan Evaluasi.
					054. Peningkatan Pemahaman Analisis dan Evaluasi	Peningkatan Pemahaman Analisis dan Evaluasi	Rp. 7.675.000,-	April - September	1. Perencanaan : - Rapat Internal; - Anev perda dengan evadata.kemenkum.go.id; - Rapat dengan Narasumber; - FGD. 2. Pelaksanaan : - Rapat Internal Analisis dan Evaluasi.
2.	Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah	1 Lembaga	051 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Rp. 40.800.000,- (Blokir)		Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik tidak bisa dilaksanakan karena Anggaran di Blokir sepenuhnya.
					052 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah	Inventarisasi dan Monev Propemperda	Rp. 6.249.000,- (Blokir)		Inventarisasi dan Monev Propemperda tidak bisa dilaksanakan karena Anggaran di Blokir sepenuhnya.
						Rekomendasi Analisa Kebutuhan Ranperda	Rp. 5.774.000,- (Blokir)		Rekomendasi Analisa Kebutuhan Ranperda tidak bisa dilaksanakan karena Anggaran di Blokir sepenuhnya.
					053 Peningkatan Pemahaman Penyusunan Prolegda dan/atau Naskah Akademik	Peningkatan Pemahaman Penyusunan Prolegda dan/atau Naskah Akademik	Rp. 67.545.000,- (Blokir)		Peningkatan Pemahaman Penyusunan Prolegda dan/atau Naskah Akademik tidak bisa dilaksanakan karena Anggaran di Blokir sepenuhnya.

3.	Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	Presentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	051. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Wilayah	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Wilayah	Rp. 15.600.000,- (tidak blokir) Rp. 53.755.000,- (blokir)	April - Juni	1. Perencanaan : - Menentukan instansi yang akan dilakukan pembinaan dan pengembangan JDIH; - Melakukan koordinasi/bersurat ke instansi yang dituju untuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan JDIH; - Menyiapkan administrasi yang diperlukan. 2. Pelaksanaan : - Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan JDIH ke daerah; - Pelaporan kegiatan.
					053. Pengelolaan Perpustakaan Hukum	Pengelolaan Perpustakaan Hukum	Rp. 10.000.000,- (tidak blokir) Rp. 1.600.000,- (blokir)	Maret	1. Perencanaan : - Berkonsultasi dengan Pejabat Pengadaan Kantor Wilayah terkait pengadaan buku hukum - Mendata buku hukum yang diperlukan 2. Pelaksanaan : Pembelian buku yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.
					054. Peningkatan Kapasitas Pengelola Perpustakaan	Peningkatan Kapasitas Pengelola Perpustakaan	Rp. 480.000,- (tidak blokir) Rp. 11.014.000,- (blokir)	April - Juni	1. Perencanaan : - Merekap kegiatan JDIH yang telah dilakukan oleh Pustakawan terkait pembinaan dan pengembangan JDIH - Menyusun Laporan pelaksanaan kegiatan 2. Pelaksanaan : Penggandaan dan penjiilidan laporan kegiatan
4.	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	051. Pemeriksaan dan Upaya Hukum Biasa	Tahap Penyidikan/Gugatan/Pemeriksaan Pendahuluan/Putusan Pengadilan Tingkat I/Upaya Hukum Biasa	Rp. 431.914.000,- (tidak blokir) Rp. 1.017.086.000,- (blokir)	Maret - Desember	1. Perencanaan : Perencanaan dilakukan oleh unit eselon 1 (BPHN) 2. Pelaksanaan : - Penandatanganan Kontrak Pelaksanaan Bantuan Hukum kantor Wilayah dengan PBH; - Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh PBH; - Pencairan anggaran bantuan hukum oleh PBH setelah dilakukan verifikasi oleh Panwasda.
					052. Upaya Hukum Luar Biasa	Tahap Peninjauan Kembali	Rp. 207.000.000,- (blokir)	-	Tahap Peninjauan Kembali tidak bisa dilaksanakan karena Anggaran di Blokir sepenuhnya.

5.	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	051. Penyebarluasan Informasi dan Penanganan Perkara di luar Pengadilan	Penyuluhan Hukum/Pemberdayaan Masyarakat/Penelitian Hukum/Mediasi/Negosiasi/Pendampingan di luar Pengadilan/Drafting Dokumen Hukum/Investigasi Perkara	Rp. 58.446.000,- (tidak blokir) Rp. 182.364.000,- (blokir)	Maret - Desember	<p>1. Perencanaan : Perencanaan dilakukan oleh unit eselon 1 (BPHN).</p> <p>2. Pelaksanaan : - Penandatanganan Kontrak Pelaksanaan Bantuan Hukum kantor Wilayah dengan PBH; - Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh PBH; - Pencairan anggaran bantuan hukum oleh PBH setelah dilakukan verifikasi oleh Panwasda.</p>
					052. Konseling	Konsultasi Hukum	Rp. 4.600.000,- (tidak blokir)	Maret - Desember	<p>1. Perencanaan : Perencanaan dilakukan oleh unit eselon 1 (BPHN).</p> <p>2. Pelaksanaan : - Penandatanganan Kontrak Pelaksanaan Bantuan Hukum kantor Wilayah dengan PBH; - Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh PBH; - Pencairan anggaran bantuan hukum oleh PBH setelah dilakukan verifikasi oleh Panwasda.</p>
6.	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah.	70%	Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah.	70%	051. Pembinaan dan Pengembangan Kelompok KADARKUM dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	Temu Sadar Hukum dan Diskusi Hukum pada Kelompok KADARKUM Tingkat Provinsi	Rp. 15.000.000,- (tidak blokir) Rp. 88.850.000,- (blokir)	Januari - Desember	<p>1. Perencanaan : - Menentukan kelompok Kadarkum yang akan diikutserakan dalam kegiatan Temu Sadar Hukum dan Diskusi Hukum; - Melakukan koordinasi/bersurat ke desa/kelurahan kedudukan kelompok kadarkum; - Menyiapkan administrasi dan keperluan lainnya oleh Kantor Wilayah.</p> <p>2. Pelaksanaan : - Pelaksanaan kegiatan Temu Sadar Hukum dan Diskusi Hukum; - Menyusun Laporan kegiatan.</p>

MATRIKS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TA 2025 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG - BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (PERJANJIAN KINERJA)	TARGET	RINCIAN OUTPUT	TARGET	KOMPONEN	SUB KOMPONEN		WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN (PER BULAN)	DETIL KEGIATAN
						NAMA KEGIATAN	ANGGARAN		
1.	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	1 Rekomendasi Kebijakan	051 Analisis Strategi Kebijakan Hukum	Analisis Evaluasi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp 35.204.000,- (Blokir) Rp 23.490.000,- (Tidak Blokir)	Februari - Desember	1. Perencanaan : - Rapat Penyusunan Desain dan Instrumen Evaluasi Kebijakan 2. Pelaksanaan : - Diskusi kelompok tertentu (FGD) Pembahasan Desain dan Instrumen Evaluasi; - Koordinasi dengan instansi terkait; - Rapat pengolahan data dan analisa data lapangan; - Diskusi publik laporan evaluasi kebijakan.
						Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM	Rp 83.010.000,- (Blokir) Rp 27.900.000,- (Tidak Blokir)	Januari - Desember	1. Perencanaan : - Rapat pembahasan data dan informasi SIPKUMHAM. 2. Pelaksanaan : - Koordinasi dengan Instansi Terkait; - Rapat pengolahan dan analisa data dan informasi SIPKUMHAM; - Rapat penyusunan laporan; - Diskusi publik hasil pemanfaatan SIPKUMHAM.
						Monitoring dan Evaluasi Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPAK)	Rp 54.040.000,- (Blokir) Rp 18.580.000,- (Tidak Blokir)	Maret - Desember	1. Perencanaan : - Rapat penyusunan proposal; - Rapat presentasi proposal. 2. Pelaksanaan : - Koordinasi dengan Instansi Terkait; - Rapat pengolahan dan analisa data; - Rapat presentasi laporan; - Rapat penyempurnaan laporan hasil kegiatan evaluasi;
						Kesekretariatan Indeks Reformasi Hukum di Wilayah	Rp 45.230.000,- (Blokir) Rp 23.530.000,- (Tidak Blokir)	Januari - Desember	1. Perencanaan : - Rapat pembentukan Tim Sekretariat IRH Wilayah. 2. Pelaksanaan : - Rapat pendampingan penilaian mandiri IRH di Pemda; - Rapat penyampaian hasil penilaian mandiri IRH di Pemda; - Koordinasi dengan Instansi Terkait.

Lampiran I
 Nomor : W.9-PR.04.05-541
 Tanggal : 06 Maret 2025

MATRIKS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TA 2025 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG - KEKAYAAN INTELEKTUAL

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (PERJANJIAN KINERJA)	TARGET	RINCIAN OUTPUT	TARGET	KOMPONEN	SUB KOMPONEN		WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN (PER BULAN)	DETIL KEGIATAN
						NAMA KEGIATAN	ANGGARAN		
1.	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	Terselesaikannya laporan atas pelanggaran KI di daerah	1 laporan	051 Pengawasan Hak Kekayaan Intelektual Di Wilayah	Pengawasan dan pemantauan atas laporan dugaan pelanggaran KI	Rp. 30.980.000,- Tidak Blokir Rp. 52.830.000,- Blokir	Januari s/d Desember	1. Perencanaan : - Penerimaan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual. 2. Pelaksanaan : - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pengawasan Pelanggaran Kekayaan Intelektual.
					052 Pendampingan Penanganan Aduan/ Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	Pendampingan Penanganam Aduan/ Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	Rp. 41.364.000,- Tidak Blokir Rp. 42.446.000,- Blokir	Januari s/d Desember	1. Perencanaan : - Penerimaan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual. 2. Pelaksanaan : - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pengawasan Pelanggaran Kekayaan Intelektual; - Gelar Perkara Pelanggaran Kekayaan Intelektual.
					053 Evaluasi dan Pelaporan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Evaluasi dan Pelaporan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Rp. 960.000,- Tidak Blokir Rp. 27.950.000,- Blokir	Januari s/d Desember	1. Perencanaan : - Pengumpulan Berkas Perkara Pelanggaran Kekayaan Intelektual. 2. Pelaksanaan : - Rapat Evaluasi Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual.
					051. Persiapan Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tanpa Sub Komponen	Rp. 210.000,- Tidak Blokir Rp. 750.000,- Blokir	Februari	1. Perencanaan : - Pengumpulan Bahan Sosialisasi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual. 2. Pelaksanaan : - Rapat Persiapan Sosialisasi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual.
					A. Diseminasi Desain Industri		Rp. 62.387.000,- Tidak Blokir Rp. 68.689.000,- Blokir	Juni	1. Perencanaan : - Pengadaan ATK; - Pengadaan Seminar Kit; - Kontrak Paket Meeting dengan Hotel; - Koordinasi dengan instansi terkait. 2. Pelaksanaan : - Sosialisasi dan Diseminasi Desain Industri.

2.	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	Kantor Wilayah menyelenggarakan promosi dan diseminasi KI	150 orang	052. Pelaksanaan Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah	B. Diseminasi Kekayaan Intelektual	Rp. 61.397.000,- Tidak Blokir Rp. 463.667.000,- Blokir	Maret	1. Perencanaan : - Pengadaan Seminar Kit; - Kontrak Paket Meeting dengan Hotel; - Koordinasi dengan instansi terkait. 2. Pelaksanaan : - Sosialisasi dan Diseminasi Desain Industri.
						C. Pelaksanaan Agenda RuKI (Guru Kekayaan Intelektual)	Rp. 39.660.000,- Tidak Blokir Rp. 149.074.000,- Blokir	Agustus	1. Perencanaan : - Survey tempat RuKI goes to Pesantren; - Pengadaan Goodie Bag; - Pengadaan Makan dan Snack Peserta. 2. Pelaksanaan : - Pelaksanaan RuKI goes to Pesantren.
						D. Penyebarluasan Informasi Kekayaan Intelektual	Rp. 9.878.000,- Tidak Blokir Rp. 291.355.000,- Blokir	Juli	1. Perencanaan : - Sewa Booth/ Perlengkapan Pameran; - Rapat Persiapan Pameran dengan instansi terkait. 2. Pelaksanaan : - Pelaksanaan Pameran Kekayaan Intelektual.
						Tanpa Sub Komponen	Rp. 210.000,- Tidak Blokir Rp. 750.000,- Blokir	Desember	1. Perencanaan : - Pembuatan Laporan Evaluasi dan Pelaporan Diseminasi dan Edukasi. 2. Pelaksanaan : - Rapat Evaluasi Diseminasi dan Edukasi.
			Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	75 orang	051 Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	Tanpa Sub Komponen	Rp. 16.870.000,- Tidak Blokir Rp. 39.630.000,- Blokir	September	1. Perencanaan : - Pengadaan ATK; - Pengadaan Makan dan Snack Peserta; - Koordinasi dengan instansi terkait. 2. Pelaksanaan : - Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual.
3.	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual	4960 permohonan	051. Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	A. Koordinasi Layanan Kekayaan Intelektual	Rp. 112.840.000,- Tidak Blokir Rp. 234.290.000,- Blokir	Januari - Desember	1. Perencanaan : - Inventaris Permasalahan dan/atau Potensi Permohonan Kekayaan Intelektual. 2. Pelaksanaan : - Koordinasi dengan instansi terkait.
						B. Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual	Rp. 123.024.000,- Tidak Blokir Rp. 282.672.000,- Blokir	Januari - Desember	1. Perencanaan : - Pengadaan Helpdesk Pelayanan Publik; - Inventaris Permasalahan Pendaftaran Kekayaan Intelektual. 2. Pelaksanaan : - Koordinasi Pendampingan Pendaftaran Kekayaan Intelektual.

				052 Evaluasi dan Pelaporan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tanpa Sub Komponen	Rp. 210.000,- Tidak Blokir Rp. 750.000,- Blokir	Januari - Desember	1. Perencanaan : - Pengumpulan Bahan Permohonan Kekayaan Intelektual. 2. Pelaksanaan : - Rapat Evaluasi Layanan Kekayaan Intelektual.
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATRIKS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TA 2025 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG - ADMINISTRASI HUKUM UMUM

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (PERJANJIAN KINERJA)	TARGET	RINCIAN OUTPUT	TARGET	KOMPONEN	SUB KOMPONEN		WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN (PER BULAN)	DETIL KEGIATAN	
						NAMA KEGIATAN	ANGGARAN			
		6%		4 Layanan	051. Layanan Kewarganegaraan	Pengambilan Sumpah Kewarganegaraan	Rp. 2.200.000,- (Blokir) Rp. 4.520.000,- (Tidak Terblokir)	Januari- desember	1. Perencanaan : - Rapat persiapan, menyusun roundup kegiatan, menyusun daftar undangan dan memeriksa kelengkapan pelaksanaan kegiatan pengambilan sumpah kewarganegaraan. 2. Pelaksanaan : - Pelaksanaan Upacara Pengambilan Sumpah Kewarganegaraan.	
						Layanan Kewarganegaraan	Rp. 13.730.000,- (Blokir) Rp. 14.760.000,- (Tidak Terblokir)	Januari- desember	1. Perencanaan : - Menerima layanan konsultasi kewarganegaraan dari pemohon. 2. Pelaksanaan : - Rapat persiapan; - Membentuk tim sidang Verifikasi dokumen permohonan Kewarganegaraan; - Melaksanakan sidang Verifikasi dokumen permohonan Kewarganegaraan; - Verifikasi lapangan terhadap dokumen permohonan.	
						052. Pelantikan PPNS	Pelantikan PPNS	Rp. 16.580.000 (Tidak Terblokir)	Januari- desember	1. Perencanaan : - Menerima konsultasi layanan permohonan pelantikan PPNS. 2. Pelaksanaan : - Rapat persiapan, menyusun roundup kegiatan, menyusun daftar undangan dan memeriksa kelengkapan pelaksanaan kegiatan pelantikan PPNS; - Melakukan Verifikasi dokumen permohonan pelantikan Calon PPNS; - Pelaksanaan Upacara Pelantikan.
						053. Pelantikan Notaris	Pelantikan Notaris	Rp. 24.420.000,- (Tidak Terblokir)	Januari- desember	1. Perencanaan : - Menerima konsultasi layanan permohonan pelantikan Notaris. 2. Pelaksanaan : - Rapat persiapan, menyusun roundup kegiatan, menyusun daftar undangan dan memeriksa kelengkapan pelaksanaan kegiatan pelantikan Notaris; - Melakukan Verifikasi dokumen permohonan pelantikan Calon Notaris; - Pelaksanaan Upacara Pelantikan.
						Layanan AHU Lainnya	Rp.55.038.000,- (Blokir) Rp. 56.022.000,- (Tidak Terblokir)	April - Oktober	1. Perencanaan : - Rapat persiapan, inventarisir permasalahan pelaksanaan layanan AHU di wilayah. 2. Pelaksanaan : - Melaksanakan koordinasi dan pengawasan dengan instansi terkait dalam pelaksanaan layanan AHU di Wilayah.	

1.	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Pelayanan Publik Lainnya	054. Layanan AHU Lainnya	Pengawasan Kepatuhan Penerapan PMPJ	Rp.141.507.000,- (Blokir) Rp. 33.760.000,- (Tidak Terblokir)	April - Oktober	1. Perencanaan : - Menyiapkan kuisioner terkait pelaksanaan penerapan PMPJ oleh Notaris; - Melaksanakan sosialisasi pengisian kuisioner PMPJ kepada notaris di Provinsi Lampung; - Melaksanakan verifikasi isian kuisioner yang telah diisi oleh notaris; - Rapat penilaian resiko dan persiapan pelaksanaan Audit Kepatuhan penerapan PMPJ; - Membentuk tim Audit Kepatuhan penerapan PMPJ. 2. Pelaksanaan : - Melaksanakan Audit Kepatuhan penerapan PMPJ kepada notaris yang memiliki penilaian resiko tinggi dan menyusun laporan pelaksanaan audit.
			055. Migrasi Data Layanan AHU	Migrasi Data Layanan AHU	Rp. 5.070.000,- (Blokir) Rp. 120.000,- (Tidak Terblokir)	Oktober - Desember	1. Perencanaan : - Rapat persiapan penentuan migrasi layanan yang akan dilaksanakan dan Membentuk tim pelaksanaan Migrasi Layayanan AHU. 2. Pelaksanaan : - Menyusun Laporan pelaksanaan migrasi layanan AHU.
			056. Sosialisasi / Diseminasi / FGD / Rakor/ Seminar / Webinar / Workshop / Pendalaman Materi Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Sosialisasi Fidusia	Rp. 81.000.000,- (Blokir) Rp. 7.500.000,- (Tidak Terblokir)	April - Oktober	1. Perencanaan : - Rapat persiapan, menyusun roundup kegiatan, menyusun daftar undangan, penentuan tema dan lokasi kegiatan, serta memeriksa kelengkapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi. 2. Pelaksanaan : - Pelaksanaan sosialisasi penyebarluasan informasi layanan fidusia di wilayah.
				Pendalaman Materi Layanan Kenotariatan	Rp. 81.000.000,- (Blokir) Rp. 7.500.000,- (Tidak Terblokir)	April - Oktober	1. Perencanaan : - Rapat persiapan, menyusun roundup kegiatan, menyusun daftar undangan, penentuan tema dan lokasi kegiatan, serta memeriksa kelengkapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi. 2. Pelaksanaan : - Pelaksanaan sosialisasi penyebarluasan informasi layanan kenotariatan di wilayah.
				Pendalaman Materi Layanan Kewarganegaraan	Rp. 81.000.000,- (Blokir) Rp. 7.500.000,- (Tidak Terblokir)	April - Oktober	1. Perencanaan : - Rapat persiapan, menyusun roundup kegiatan, menyusun daftar undangan, penentuan tema dan lokasi kegiatan, serta memeriksa kelengkapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi. 2. Pelaksanaan : - Pelaksanaan sosialisasi penyebarluasan informasi layanan kewarganegaraan di wilayah.
				Pendalaman Materi Layanan AHU Lainnya	Rp. 122.389.000,- (Blokir) Rp. 7.500.000,- (Tidak Terblokir)	April - Oktober	1. Perencanaan : - Rapat persiapan, menyusun roundup kegiatan, menyusun daftar undangan, penentuan tema dan lokasi kegiatan, serta memeriksa kelengkapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi. 2. Pelaksanaan : - Pelaksanaan sosialisasi penyebarluasan informasi layanan AHU lainnya di wilayah.

		057. Publikasi, Pameran dan Helpdesk	Publikasi dan Pameran	Rp. 392.701.000,- (Blokir) Rp. 130.000.000,- (Tidak Terblokir)	April - Oktober	1. Perencanaan : - Inventarisir layanan AHU yang memiliki PNPB rendah dan penentuan Potensi peningkatan PNPB pada layanan AHU di wilayah; - Rapat persiapan penentuan layanan/ kegiatan yang akan dilakukan publikasi. 2. Pelaksanaan : - Melaksanakan publikasi layanan AHU di wilayah melalui media cetak/elektronik dan pembuatan MAP layanan/Brosur/Pamflet/Leaflet.		
			Help desk Layanan AHU	Rp. 98.920.000,- (Blokir) Rp. 85.000.000,- (Tidak Terblokir)	April - Desember	1. Perencanaan : - Rapat persiapan, menyusun kriteria calon tenaga outsourcing; - Rapat tim pemilihan calon penyedia. 2. Pelaksanaan : - Pemilihan calon penyedia; - Pelaksanaan kontrak penyedia tenaga outsourcing.		
			058. Koordinasi	Koordinasi dengan Instansi Terkait	Rp. 28.120.000,- (Blokir) Rp. 22.360.000,- (Tidak Terblokir)	April - Oktober	1. Perencanaan : - Rapat persiapan, melakukan pemetaan layanan AHU di Provinsi Lampung yang memiliki potensi terhadap peningkatan PNPB. 2. Pelaksanaan : - Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait/pemerintah daerah/swasta/notaris; - Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan layanan ahu pada Mall Layanan Publik yang ada di Provinsi Lampung.	
				Koordinasi dengan Unit Pusat	Rp. 40.526.000,- (Blokir) Rp. 40.526.000,- (Tidak Terblokir)	April - Oktober	1. Perencanaan : - Rapat persiapan, inventarisir permasalahan pelaksanaan layanan AHU di wilayah. 2. Pelaksanaan : - Koordinasi dengan Sekretariat Ditjen AHU terkait kendala dan permasalahan pelaksanaan layanan AHU di Wilayah.	
		2. Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah	1 Layanan	051. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan Evaluasi	Rp. 41.796.000,- (Blokir) Rp. 35.724.000,- (Tidak Terblokir)	April - Oktober	1. Perencanaan : - Rapat persiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan sosialisasi layanan AHU telah dilaksanakan, inventarisasi permasalahan pelaksanaan layanan AHU. 2. Pelaksanaan : - Melaksanakan Monitoring dan koordinasi ke pemerintah daerah/instansi terkait/notaris yang memiliki jumlah PNPB rendah.
				052. Laporan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan Pemantauan dan Evaluasi	Rp. 36.228.000,- (Blokir) Rp. 36.228.000,- (Tidak Terblokir)	April - Oktober	1. Perencanaan : - Rapat persiapan penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi layanan AHU di wilayah. 2. Pelaksanaan : - Melaksanakan pemantauan ke daerah terkait keberhasilan pelaksanaan sosialisasi layanan AHU; - Menyusun laporan Pemantauan dan Evaluasi terkait pelaksanaan sosialisasi Layanan AHU di wilayah.

2.	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	1. Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah	1 Perkara	051. Advokasi Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah	Advokasi	Rp. 1.780.000,- (Blokir) Rp. 200.000,- (Tidak Terblokir)	April - Oktober	1. Perencanaan : - Menerima laporan gugatan atas produk layanan AHU di Wilayah; - Rapat persiapan atas laporan gugatan produk layanan AHU di Wilayah; - Menyusun jawaban atas gugatan produk layanan AHU di Wilayah. 2. Pelaksanaan : - Menghadiri sidang gugatan; - Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan advokasi.
					052. Koordinasi	Koordinasi	Rp. 2.980.000,- (Blokir) Rp. 1.200.000,- (Tidak Terblokir)	April - Oktober	1. Perencanaan : - Rapat pembentukan tim advokasi. 2. Pelaksanaan : - Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelesaian gugatan yang telah diterima.
			2. Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah	10 Lembaga	051. Dukungan Kesekretariatan dan Pengawasan MPW	Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan kenotariatan pada MPW	Rp. 487.570.000,- (Blokir) Rp. 50.700.000,- (Tidak Terblokir)	Januari- desember	1. Perencanaan : - Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan majelis setiap bulan. 2. Pelaksanaan : - Pembayaran honorarium anggota dan sekretaris MPW.
					052. Dukungan Kesekretariatan dan Pengawasan MPD	Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Kenotariatan Pada MPD	Rp. 657.265.000,- (Blokir) Rp. 340.800.000,- (Tidak Terblokir)	Januari- desember	1. Perencanaan : - Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan majelis setiap bulan. 2. Pelaksanaan : - Pembayaran honorarium anggota dan sekretaris MPD.
					053. Dukungan Kesekretariatan dan Pengawasan MKNW	Penanganan Permasalahan Kenotariatan Pada MKNW	Rp. 44.200.000,- (Blokir) Rp. 22.500.000,- (Tidak Terblokir)	Januari- desember	1. Perencanaan : - Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan majelis setiap bulan. 2. Pelaksanaan : - Pembayaran honorarium anggota dan sekretaris MKNW